

Analisis Pelaksanaan Program PKH dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Ave Maretta Purba¹, Jelita Kartini Br. Pakpahan², Rosdiana Nababan³
Nikodemus Niko^{4*}

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

² Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

³ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

⁴ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

* Email Corresponding Author: nikodemusn@umrah.ac.id

Abstract - Poverty remains a pressing concern globally, and Indonesia is no exception. This study investigates the effectiveness of the Indonesian government's poverty alleviation efforts, focusing on the Conditional Cash Transfer (PKH) program, implemented since 2008. Employing a qualitative, descriptive research approach, data was gathered through interviews and literature studies. The research reveals that PKH assistance, provided in both cash and non-cash forms, has significantly contributed to improving economic, educational, and health aspects of beneficiary households. The disbursement, occurring four times annually through the Prosperous Family Card via Bank Himbara, involves a strategic allocation of Rp. 600,000 per installment. Financial resources and coordination emerge as crucial supporting factors, impacting the program's success. However, individual conflicts pose a challenge to PKH implementation, especially in cases where participants perceive themselves differently in terms of economic status. Understanding these dynamics is essential for optimizing poverty alleviation efforts in Indonesia.

Keywords: Poverty, PKH, Empowerment, Welfare

Abstrak

Isu kemiskinan hingga kini menjadi perhatian global, tidak terkecuali di Indonesia. Studi ini mengeksplorasi efektivitas upaya pengentasan kemiskinan pemerintah Indonesia, dengan fokus pada program Bantuan Langsung Tunai (PKH) yang diterapkan sejak tahun 2008. Dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini mengungkapkan bahwa bantuan PKH, yang disediakan dalam bentuk uang tunai dan non-tunai, telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan rumah tangga penerima manfaat. Pencairan dana, yang terjadi empat kali setahun melalui Kartu Keluarga Sejahtera melalui Bank Himbara, melibatkan alokasi strategis sebesar Rp. 600.000 per pencairan. Sumber daya keuangan dan koordinasi muncul sebagai faktor pendukung krusial yang memengaruhi keberhasilan program. Namun, konflik individu menjadi tantangan dalam pelaksanaan PKH, terutama dalam kasus di mana peserta memiliki persepsi berbeda terkait status ekonomi mereka. Memahami dinamika ini penting untuk mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, PKH, Pemberdayaan, Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan pembangunan berkelanjutan yang memuat 17 tujuan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dunia. Kemiskinan merupakan salah satu tujuan SDGs yang sampai saat ini masih menjadi topik yang sangat penting. Kemiskinan masih menjadi masalah penting bagi Negara Indonesia sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat (Saragi et al., 2021; Niko,

2019). Kemiskinan merupakan tantangan global yang terus memerlukan perhatian serius, dan upaya pengentasannya menjadi prioritas utama dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Jevtic et al., 2021). Di Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam, masalah kemiskinan masih menjadi isu krusial (Handrian & Andry, 2020). Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini masih terus gencar dilakukan, berbagai macam program pemberdayaan dilaksanakan, hal ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik (Rupita & Niko, 2020; Setiadi et al., 2022). Sejak tahun 2007, salah satu program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah program keluarga harapan (PKH) yang bertujuan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan (Alexandri, 2020). PKH merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga penerima manfaat terhadap pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek penting lainnya yang dapat mengangkat mereka dari garis kemiskinan (Bangkulu et al., 2021). Meskipun PKH telah menjadi fokus utama kebijakan pemerintah, implementasinya di tingkat lokal, terutama di kota-kota kecil (termasuk Tanjungpinang), melibatkan dinamika dan tantangan tersendiri yang perlu dipahami (Oktaviani et al., 2023; Walinegoro et al., 2023).

Pemerintah Indonesia melakukan percobaan Program PKH di 7 Provinsi dan 48 Kabupaten Kota. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, dan diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Adapun aspek komponen penerima bantuan PKH diantaranya, aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat. Artinya setiap masyarakat yang menjadi peserta sasaran program memiliki kewajiban yang ditentukan Kementerian Sosial sebagai syarat penerima bantuan. Tujuan program ini selain untuk menurunkan angka kemiskinan, juga untuk membuka akses bagi ibu hamil, balita dan lansia mendapatkan manfaat layanan dan fasilitas kesehatan. Bagi anak usia sekolah mendapatkan manfaat pelayanan pendidikan. Dengan bantuan ini, tidak ada alasan bagi setiap masyarakat Indonesia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan maupun pendidikan.

Jumlah penerima PKH, hingga tahun 2019 sebanyak 9.841.270 keluarga. Hal ini meningkat tajam dibanding pada pertama kali program ini diluncurkan, yaitu sebanyak 387.947 keluarga. Dengan merawat ibu hamil dan balita, kemudian mengantarkan anak-anak ke bangku pendidikan, diharapkan akan berdampak jangka panjang terhadap pemutusan rantai kemiskinan lintas generasi. Sejak 2013, Kota Tanjungpinang menjadi salah satu penerima bantuan PKH yaitu di wilayah Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Tabel 1. Penerima Bantuan PKH di Kota Tanjungpinang

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kota ini, sebagai salah satu kawasan kepulauan dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang khas, menjadi objek penelitian yang menarik untuk memahami bagaimana program pemberian bantuan sosial dapat berkontribusi pada meningkatkan kesejahteraan

an Jiwa				
Tahun	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
2018	2104	5518	5503	5326
2019	5297	5281	5258	5044
2020	4963	4959	5174	-

keluarga di tingkat lokal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau

tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Tanjungpinang, Perumahan Griya Hangtuh Permai RT 03/ RW 05. Dalam proses penelitian, peneliti memilih 4 informan. Selain itu penulis menggunakan teknik purposive karena penulis mengharapkan narasumber sesuai dengan tema dan fokus pembahasan yang ingin diteliti oleh penulis.

Informan yang peneliti pilih yakni Ketua RT 03, dan masyarakat penerima PKH. Wawancara yang penulis lakukan menggunakan 12 instrumen pertanyaan. Penulis menggunakan strategi agar suasana wawancara menjadi lebih santai. Kendala yang dihadapi oleh penulis saat melakukan wawancara adalah beberapa pertanyaan tidak dijawab dengan jelas, seperti pertanyaan tentang bagaimana reaksi penerima terkait dengan adanya penstemplatan simbol PKH. Selain itu penulis menggunakan alat bantu untuk mengingat jawaban dari informan yaitu dengan menggunakan rekaman dari Handphone. Alasan menggunakan alat tersebut agar penulis dapat mengetahui pernyataan jawaban dari informan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan di Tanjungpinang diterapkan yaitu bantuan kepada keluarga miskin berupa (sembako) non tunai dan tunai. Penerima manfaat PKH, diantaranya berada di Perumahan Griya Hangtuh Permai Kota Tanjungpinang, dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin. Adanya PKH ini, pemerintah mengharapkan bahwa setiap penerima dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. PKH merupakan salah satu program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan berbagai syarat (Muttakin et al., 2021). Program ini dilakukan dengan tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan.

A. Syarat penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan temuan dari penelitian di RT 03/ RW 05, terdapat syarat yang disampaikan melalui RT setempat, yakni masyarakat yang kurang mampu (terkhusus pada anak sekolah, ibu hamil, janda dan lansia), KTP, dan KK, surat keterangan tidak mampu yang didapatkan dari RT kemudian diajukan ke Kelurahan setelah itu ke Dinas Sosial. Salah satu Perumahan yang mendapatkan alokasi dana bantuan keluarga harapan tersebut adalah Perumahan Griya Hangtuh Permai RT 03/ RW 05. Setiap penerima bantuan PKH ini akan diberikan tanda atau cap merah sebagai tanda bahwa warga tersebut merupakan penerima bantuan PKH. Berdasarkan dari temuan lapangan, terdapat 13 penerima bantuan PKH.

B. Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH dan beberapa peserta PKH, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan PKH kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) khususnya di Perum. Griya HangTuh Permai semakin meningkat. Meskipun perubahan yang terjadi terhadap kondisi sosial ekonomi rukun setempat tidak signifikan, namun setidaknya terjadi peningkatan. Serta dari pendapat pendamping PKH serta beberapa peserta PKH dan observasi lapangan.

Berdasarkan keterangan dari beberapa peserta PKH, mereka mengakui bahwa setelah mendapat bantuan PKH tersebut anak-anak usia sekolah dapat bersekolah setidaknya hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada yang sampai jenjang perkuliahan. Adapun penerima PKH di Perumahan Griya Hangtuh Permai sebagai berikut:

Tabel 2. Penerima Bantuan PKH di Perumahan Griya Hangtuh Permai RT 03/ RW 05

No	Nama Penerima	Alamat
1.	Ds	Blok. J. 44
2.	El	Blok. L.17
3.	Em	Blok. I. 40
4.	Jl	Blok. K.24
5.	La	Blok. L.33
6.	MN	Blok. L.26
7.	RR	Blok. I. 25
8.	Rt	Blok. L.48
9.	Rm	Blok. J. 43
10.	Sn	Blok. J. 45
11.	Si	Blok. K.26
12.	Yi	Blok. K. 30
13.	Yr	Blok. K. 57

Sumber: Pendamping PKH Kota Tanjungpinang (2022)

Dalam pelaksanaan PKH tidak terlepas dari adanya faktor. Dalam hal ini faktor pendukung dari implementasi PKH adalah sumber daya finansial yang cukup sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan dari program tersebut. Faktor pendukung berikutnya adalah koordinasi. Bahwa koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKH di Perum. Griya Hang Tuah Permai sudah bagus. Hal ini terbukti dari adanya dukungan dari setiap pihak-pihak yang terkait. Dan para peserta PKH juga sangat antusias dan mendukung program tersebut. Faktor pendukung lainnya adalah adanya peran dari pendamping PKH. Bahwa pendamping PKH adalah orang yang berhubungan langsung dengan para penerima PKH. Sehingga pendamping PKH juga merupakan aktor yang sangat penting dalam pelaksanaan program PKH tersebut.

Faktor penghambat dari pelaksanaan PKH di Perum. Griya Hang Tuah Permai adalah faktor konflik yang terjadi antar individu. Dari keterangan pendamping PKH di Perum Hang Tuah Permai, masyarakat disana banyak yang tidak faham terhadap program tersebut. Banyak dari peserta PKH yang sudah dianggap Graduasi (ada peningkatan pendapatan) namun terkadang ada peserta PKH yang menganggap bahwa dirinya masih transisi (dianggap masih miskin). Karena bagi peserta PKH yang dianggap sudah graduasi maka bantuan PKH dihentikan. Kemudian, antar Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sering kali terjadi kecemburuan antar peserta penerima PKH. Kecemburuan sosial merupakan sebuah perasaan dalam hati seseorang mengenai keraguan dan ketidaksenangan terhadap sesuatu, yang tanpa didasari alasan yang jelas. Salah satu sebab mengapa kecemburuan sosial dapat terjadi adalah dikarenakan berawal dari rasa iri seseorang kepada orang lain yang bantuan Program Keluarga Harapan, sehingga muncullah rasa cemburu. Maka dengan seperti itu maka pendamping PKH mensosialisasikan kepada masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil dari wawancara informan Bapak Iz (rm) yang merupakan penerima bantuan PKH sejak tahun 2008 sampai sekarang. Adapun bentuk bantuan yang diberikan Pemerintah pada tahun 2008-2021 berupa beras 45kg. Menurut informan, bantuan PKH ini sangat membantu dalam perekonomian. Informan selanjutnya, yaitu Ibu Dw (MN) merupakan penerima bantuan PKH sejak 2008 sampai sekarang. Informan Ibu Yr yang juga merupakan penerima bantuan PKH sejak tahun 2013 sampai sekarang mendapatkan bantuan berupa beras, anak sekolah (KIP), uang tunai. Menurut informan, bantuan PKH ini sangat membantu sekali dalam perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Ada pemutusan PKH ini selama 6 bulan dan kembali disambungkan. Alasan terdapat adanya pemutusan program ini karena harus ada pergiliran. Adanya kecemburuan sosial antar warga membuat Ibu Yr pernah memberikan kepada tetangga yang tidak mendapatkan bantuan PKH. Adanya pencapan tanda PKH ini, Ibu Yr tidak ada rasa malu karena menurutnya bahwa program ini halal.

Tahapan dalam pengambilan dana PKH dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun dengan rentan waktu 2 bulan sekali dengan pencairan sebesar Rp. 600.000,- yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang pencairannya melalui Bank Himbara. Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini pemerintah sangat mengharapkan setiap peserta memiliki akses yang baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar seperti Kesehatan, pendidikan, pangan yang sesuai dengan tujuan pembangunan di Kota Tanjungpinang. Dalam melihat pelaksanaan Program PKH, ditemukan bahwa implementasi program ini di Kota Tanjungpinang telah mengalami sejumlah kemajuan yang signifikan. Bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat secara teratur melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Bank Himbara telah memfasilitasi akses lebih mudah dan efisien dalam distribusi dana bantuan. Pencairan dana sebanyak empat kali setahun dengan alokasi sebesar Rp. 600.000 per pencairan memberikan dukungan finansial yang bersifat reguler kepada keluarga penerima manfaat.

Selain itu, program ini juga memberikan bantuan non-tunai yang mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Adanya bantuan ini terbukti memiliki dampak positif dalam meningkatkan akses keluarga penerima manfaat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Anak-anak di keluarga penerima manfaat PKH cenderung memiliki tingkat kehadiran sekolah yang lebih baik, sementara ibu hamil dan anak balita mendapatkan akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Tanjungpinang. Secara ekonomi, bantuan tunai dan non-tunai dari program ini telah membantu keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. Dengan demikian, terlihat adanya peningkatan taraf hidup keluarga tersebut.

Dalam sektor pendidikan, tercatat peningkatan partisipasi anak-anak keluarga penerima manfaat di lembaga pendidikan. Ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya memberikan kontribusi finansial, tetapi juga mendorong akses dan partisipasi dalam pendidikan formal. Selain itu, peningkatan akses kesehatan juga teramati, terutama pada ibu hamil dan anak balita. Kemudian, faktor-faktor pendukung pelaksanaan PKH meliputi tersedianya sumber daya keuangan yang memadai dan koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan terkait. Sumber daya keuangan yang cukup memastikan kelancaran pencairan dana dan kelanjutan program. Koordinasi yang baik, baik antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat, membantu menjaga keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat, terutama konflik individu di antara peserta program. Beberapa peserta mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang status ekonomi mereka, yang dapat memunculkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap kriteria seleksi penerima manfaat. Konflik semacam ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kelancaran implementasi PKH.

IV. KESIMPULAN

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini masih terus gencar dilakukan, berbagai macam program pemberdayaan. Salah satu program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah program keluarga harapan (PKH) yang bertujuan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan PKH tidak terlepas dari adanya faktor pendukung serta faktor penghambat. Dalam hal ini faktor pendukung dari implementasi PKH adalah sumber daya finansial yang cukup sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan dari program tersebut. Faktor pendukung berikutnya adalah koordinasi. Faktor penghambat dari pelaksanaan PKH di Perum. Griya Hang Tuah Permai adalah faktor konflik yang terjadi antar individu. Banyak dari peserta PKH yang sudah dianggap Graduasi (ada peningkatan pendapatan) namun terkadang ada peserta PKH yang menganggap bahwa dirinya masih transisi 1 (dianggap masih miskin).

Berdasarkan hasil penelitian ini, bantuan PKH ini sangat membantu dalam perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini pemerintah sangat mengharapkan setiap peserta memiliki akses yang baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar seperti Kesehatan, pendidikan, pangan yang sesuai dengan tujuan pembangunan di Kota Tanjungpinang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 237-244.
- Bakulu, B., Pangkey, M., & Kolondam, H. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Jevtic, M., Matkovic, V., & Bouland, C. (2021). Poverty and energy issues as environmental and health challenges in SDGs. *European Journal of Public Health*, 31(Supplement_3), ckab164-734.
- Muttakin, F., Fatwa, K. N., & Sarbaini, S. (2021). Implementasi Additive Ratio Assessment Model untuk Rekomendasi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. *SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 19(1), 40-48.
- Niko, N. (2019). Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan di Kalimantan Barat sebagai Bentuk Kolonialisme Baru. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 58-76.
- Oktaviani, I. N., Rawita, I. S., & Siregar, H. (2023). Penggunaan Pendekatan Kelompok pada Program Pendampingan Keluarga Harapan. *Empiricism Journal*, 4(1), 43-52.
- Rupita, R., & Niko, N. (2020). From Socialism to Capitalism: Structural Poverty of Indigenous Women in West Kalimantan, Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(2), 187-200.
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1-10.
- Setiadi, A. D., Triayudi, A., & Iskandar, A. (2022). Perbandingan Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode WP Dan TOPSIS Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kampung Kramat. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(6), 2124-2131.
- Walinegoro, B. G., Saputra, G., Inayah, F., & Sari, L. W. (2023). Tata Kelola Inovasi Layanan Publik: Program Lasamba (Layanan Sambang Warga) Dinas Sosial Kabupaten Sleman. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 42-60.